PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN DI ILIRAN DAN ULUAN PASCA RUNTUHNYA KESULTANAN PALEMBANG (1825-1942)

SKRIPSI

OLEH
PUPUT NOVIANA
NIM 352015014

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JULI 2019

PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN DI ILIRAN DAN ULUAN PASCA RUNTUHNYA KESULTANAN PALEMBANG (1825-1942)

SKRIPSI

Diajukan kepada
Universitas Muhammadiyah Palembang
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan program Sarjana Pendidikan

Oleh
Puput Noviana
NIM 352015014

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
Juli 2019

Skripsi oleh Puput Noviana ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Palembang, 13 Juli 2019
Pembimbing I,

Heryati, S.Pd., M.Hum.

Palembang, 11 Juli 2019
Pembimbing II,

Yusinta Tia Rusdiana, M.Pd.

ii

Skripsi oleh Puput Noviana ini telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal, 17 Juli 2019

Dewan Penguji

Heryati, S.Pd., M.Hum., Ketua

Yusinta Tia Rusdiana, M.Pd., Anggota

Yuliarni, S.Pd.,M.Hum., Anggota

Mengetahui
Ketua Program Studi
Pendidikan Sejarah,

Heryati, S.Pd., M.Hum.

Mengesahkan
Dekan
FKIP UMP,

Dr. H. Rusdy A.S., M.Pd.

iii

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	: Puput Noviana
Tempat/Tanggal lahir	: Oku Timur, 24 Agustus 1997
NIM	: 352015014
Program studi	: Pendidikan Sejarah
Perguruan Tinggi	: Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi ini dengan segala konsekuensinya.

2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, alih media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Palembang, Agustus 2019

Puput Noviana

ABSTRAK

Noviana, Puput. 2019. *Perbandingan Sistem Pemerintahan di Iliran dan Uluan Pasca Runtuhnya Kesultanan Palembang Pada Tahun (1825-1942).* Skripsi, Program Studi Pendidikan Sejarah, Program Sarjana (S1) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang. Pembimbing: (1) Heryati, S.Pd.,M.Hum, (II) Yusinta Tia Rusdiana, M.Pd.

***Kata kunci*:** Sistem, Pemerintahan, Kesultanan Palembang.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Perbandingan Sistem Pemerintahan di Iliran dan Uluan Pasca Runtuhnya Kesultanan Palembang Pada Tahun (1825-1942). *Rumusan Masalah* : (1) Bagaimana sistem pemerintahan di Iliran pasca runtuhnya Kesultanan Palembang pada tahun 1825-1942. (2) Bagaimana sistem pemerintahan di Uluan pasca runtuhnya Kesultanan Palembang pada tahun 1825-1942. (3) Bagaimana dampak dari sistem pemerintahan di Iliran dan Uluan pasca runtuhnya Kesultanan Palembang pada tahun 1825-1942. *Metode Penelitian* : metode sejarah (metode historis). *Pendekatan Penelitian* : geografi, politik, antropologi budaya, sosiologi, ekonomi, historis. *Jenis Penelitian* : Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu kajian pustaka. *Kesimpulan*: (1) Sistem Pemerintahan di Iliran pasca runtuhnya Kesultanan Palembang pada tahun 1825-1942 adalah pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan suatu bentuk pemerintahan *Dedilijke Regeering*, yaitu suatu bentuk pemerintahan pragmatis yang dimana sistem pemerintahannya hanya tinggal melanjutkan sistem pemerintahan yang telah ada sebelumnya, raja tertinggi pada saat setelah kesultanan Palembang runtuh raja tertinggi nya yaitu residen. (2) Sistem pemerintahan di Uluan pasca runtuhnya Kesultanan Palembang pada tahun 1825-1942 adalah pemerintah kolonial Belanda menjadikan daerah pedalaman sebagai "Republik Desa" yang dimana tujuannya agar rakyat desa bisa mengalami kemajuan dari masa pemerintahan sebelumnya. Di daerah Uluan sistem pemerintahannya di jalankan oleh seorang *Pasirah* dengan gelar *Depati*. (3) Dampak dari sistem pemerintahan di Iliran dan Uluan pasca runtuhnya Kesultanan Palembang pada tahun 1825-1942 ini berdampak pada 2 bidang yaitu pada bidang politik dan ekonomi. Belanda menjalankan politik liberal dengan sistem ekonomi "pintu terbuka", Open the door politie sehingga banyaknya orang-orang Belanda atau bangsa Barat lainnya hadir di dalam kehidupan orang-orang Uluan. *Saran* : (1) Kepada Mahasiswa FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang khususnya Program Studi Sejarah, hendaknya terus menggali dan mempelajari peristiwa sejarah lokal atau nasional, karena akan sangat bermanfaat untuk dijadikan pedoman dan pegangan pada masa yang akan datang. (2) Khususnya bagi masyarakat Palembang dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan akan memperkaya pengetahuan tentang ilmu sejarah khususnya mengenai sejarah yang ada di Daerah dan di Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Perbandingan Sistem Pemerintahan di Iliran dan Uluan Pasca Runtuhnya Kesultanan Palembang (1825-1942)* dapat terlaksana dengan baik.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapipersyaratan akhir perkuliahan untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S1) Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam penulisan ini, penulis banyak mendapatkan arahan, bimbingan, petunjuk dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga kesulitan yang penulis rasakan dapat diatasi. Pada kesempatan ini penulisan mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. H. Rusdy AS., M.Pd., dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Para Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Heryati, S.Pd., M.Hum, Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Palembang, sekaligus pembimbing I dalam penyusunan skripsiini di Universitas muhammadiyah Palembang.
4. Yusinta Tia Rusdiana, M.Pd, selaku pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang

6. Teristimewa ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya untuk kedua orangtuaku tercinta, Ibunda Tukiyem dan Ayahanda Bandi yang selalu senantiasa memberikan motivasi dan doa demi keberhasilan skripsi ini.
7. Kakak-kakak ku Sutrisno, Supriyanti, Sri Ernawati, Wawan Tri Handono S.T, Desi Puspita Sari A.Md.Far beserta adik-adikku yang selalu memberikan motifasi dalam penyelesaian skripsi ini
8. Rekan-rekan seperjuangan se-almamater angkatan 2015 Program Studi Pendidikan Sejarah.
9. Almamater tercinta.

Demikian pula kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga amal dan kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Dan harapan penulis semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, serta bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. Serta penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Palembang, Agustus 2019

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **viii**
DAFTAR TABEL ..... **x**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Batasan Masalah 13
C. Rumusan Masalah 14
D. Tujuan Penelitian 15
E. Manfaat Penelitian 15
F. Definisi Istilah 16

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Sistem Pemerintahan, Iliran, Uluan, Kesultanan, Palembang 19
1. Pengertian Sistem Pemerintahan 19
2. Pengertian Iliran 21
3. Pengertian Uluan 21
4. Pengertian Kesultanan 22
5. Pengertian Palembang 23
B. Tinjauan Alamiah Daerah Palembang 24
1. Letak Geografis 24
2. Demografi Penduduk Kota Palembang 27
C. Keadaan Stuktur Pemerintahan dan Masyarakat di Uluan dan Iliran Sebelum Runtuhnya Kesultanan Palembang 27
1. Struktur Pemerintahan 27
2. Struktur Masyarakat 40
D. Keadaan Sosial, Ekonomi, Seni dan Budaya, Bahasa dan sastra Masyarakat Sebelum Runtuhnya Kesultanan Palembang 46
1. Keadaan Sosial Masyarakat Sebelum Runtuhnya Kesultanan Palembang 46
2. Keadaan Ekonomi Masyarakat Sebelum Runtuhnya Kesultanan

Palembang.....49
3. Keadaan Seni dan Budaya Masyarakat Sebelum Runtuhnya Kesultanan Palembang.....52
4. Bahasa dan sastra Masyarakat Sebelum Runtuhnya Kesultanan Palembang.....62

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pengertian Metode Penelitian.....68
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....72
1. Pendekatan Penelitian.....72
a. Pendekatan Geografi.....73
b. Pendekatan Politik.....74
c. Pendekatan Antropologi Budaya.....75
d. Pendekatan Sosiologi.....76
e. Pendekatan Ekonomi.....76
f. Pendekatan Historis.....77
2. Jenis Penelitian.....77
.....
C. Lokasi Penelitian.....78
D. Kehadiran Penelitian.....78
E. Sumber Data.....79
F. Prosedur Pengumpulan Data.....81
1. Studi Kepustakaan.....83
2. Dokumentasi.....84
G. Teknik Analisis Data.....85
H. Teknik Analisis Data Historis.....85
a. Kritik Sumber.....86
1. Kritik Eksternal.....86
2. Kritik Intern.....88
b. Interpretasi.....88
c. Historiografi.....89
I. Tahap -Tahap Penelitian.....91

BAB IV PEMBAHASAN

A. Sistem Pemerintahan di Iliran Pasca Runtuhnya Kesultanan Palembang pada Tahun (1825-1942).....94
B. Sistem Pemerintahan di Uluan Pasca Runtuhnya Kesultanan Palembang pada Tahun (1825-1942).....105
C. Dampak sistem Pemerintahan di Iliran dan Uluan Pasca Runtuhnya Kesultanan Palembang pada Tahun (1825-1942).....117
1. Dampak di Bidang Politik.....117
2. Dampak di Bidang Ekonomi.....119

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan.....125
B. Saran.....127

DAFTAR RUJUKAN.....128
LAMPIRAN 131
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 153

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1. Tabel Tahap-tahap Penelitian 3.1 92

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran **Halaman**

1. Surat Keterangan Pertanggung Jawaban Penulisan Skripsi 131

2. Usul Judul Skripsi..... 132

3. SK Pembimbing Skripsi 133

4. Undangan Simulasi Proposal Skripsi 134

5. Daftar Hadir Simulasi Proposal Skripsi..... 142

6. Catatan Bimbingan Skripsi..... 147

7. Surat Persetujuan Skripsi..... 152

8. Daftar Riwayat Hidup..... 153

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

1. Pangeran Goetika 103

2. Pasirah Uluan dari Afdeeling Rawas.....107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagian besar kota di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan kota tersebut memiliki ciri dan hirarki yang berbeda dimasing-masing kota. Perbedaan ini dapat terjadi dikarenakan adanya perbedaan kebudayaan dimasing-masing daerah di Indonesia.

Pergantian pemerintahan menjadikan berbagai kebijakan yang berlaku di kota Palembang juga berubah mengikuti orientasi pemerintahan yang berlaku. Hal ini juga menimbulkan perbedaan pusat pemerintahan yang berlaku di Palembang. Letak pusat pemerintahan pada masa Kesultanan Palembang tidak diragukan lagi letaknya yang berada di tepi Sungai Musi, hal ini ditunjukkan dengan adanya Keraton Palembang yang pada zaman Belanda telah berubah fungsinya menjadi sebuah benteng yang hingga saat ini disebut sebagai Benteng Kuto Besak.

Dari data sejarah yang ditemukan pada awal masa kejayaannya, Palembang merupakan suatu kota yang berkembang karena adanya pusat keagamaan dan pusat perdagangan. Pusat keagamaan berada di daerah pedalaman sedangkan pusat perdagangan bertumpu pada tepi Sungai Musi yang saat itu menjadi jalur pelayaran bagi para pedagang dari berbagai negara di dunia. “Terjadinya perubahan pemerintahan menjadikan banyaknya perubahan kebijakan yang berlaku dari masa ke masa, terutama kebijakan didalam pemerintahan dan perekonomian”(Djohan, 1955:13).

Sejarah kerajaan Palembang atau Kesultanan Palembang terjadi dalam abad ke-17 M dan ke-18 M sampai dengan awal abad ke-19 M. Tempatnya adalah di kota Palembang dan sekitarnya, baik disebelah sungai Musi maupun di hulu dan anak-anaknya, yang dikenal dengan Batanghari Sembilan. Kota Palembang semula termasuk wilayah kerajaan Budha Sriwijaya yang berkuasa dari tahun 683 M sampai kira-kira tahun 1371 M. Catatan mengenai waktu berakhirnya Kerajaan Sriwijaya bermacam-macam, yang pasti setelah runtuhnya kerajaan ini mengalami kekosongan kekuasaan, dan menjadi taklukan kerajaan Majapahit pada pertengahan abad ke-15 sampai tahun 1527 M (Harun, 1995: 45).

> Hubungsn Iliran dan Uluan secara geografis dapat dibedakan secara keruangan, sehingga keruangan wilayah Sumatera Selatan dibagi menjadi dua, Iliran untuk pusat kota Palembang lama. Sedangkan Uluan adalah seluruh kawasan yang berada di luar kawasan Palembang lama. Kota Palembang lama meliputi wilayah yang mencakup sebelah Barat adalah kawasan Kuto Gawang (Pusri sekarang)sampai di Timur di kawasan Sri Kecetra/Gandus (Talang Kelapa Sekarang). Kawasan Iliran (kira-kira tahun 1481). Sebagai pusat kota identik dengan majunya peradaban, sedangkan kawasan Uluan identik sebagai kawasan penunjang peradaban Raden Fatah memperoleh gelar Senapati Jimbun Ngabdu'r-Rahman Panembahan Palembang Sayidin Panata'Gama (Santun, 2010:40-43).

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa hubungan daerah Iliran dengan Uluan dilihat dari segi geografisnya dibedakan atas keruangannya, bahwasannya daerah Iliran merupakan sebutan kawasan untuk kawasan pusat kota Palembang lama sedangkan daerah Uluan yaitu sebutan seluruh kawasan yang berada di luar kawasan Palembang lama.

Daerah Iliran di identifikasikan mendapat pengaruh kuat dari pusat ibu kota sehingga lebih bercorak modern. Sementara, daerah Uluan dikategorikan masih

berada dalam alam tradisional, karena sedikit mendapat sentuhan pusat ibukota Keresidenan. Sultan Mahmud Badaruddin II adalah pemimpin Kesultanan Palembang Darussalam selama dua periode (1803-1813, 1818-1821), setelah masa pemerintahan ayahnya Sultan Muhammad Bahauddin (1776-1803).

> Orang Iliran menganggap dirinya lebih beradab serta pemilik peradaban itu sendiri dalam lingkup Sumatera Selatan. Secara ideologis, menganggap dirinya tentu lebih modern, cenderung terbuka, orang yang maju, lebih intelek, sehingga secara politis mereka merasa lebih berkuasa, seperioritas dengan segala ritualisme kebijakan, kewenangan, kegagahan dan kewibawaan, sementara secara ekonomis mereka menganggap dirinya lebih makmur dan kaya. Sebaliknya, orang Uluan sering dihadapkan dengan konsepsi ritualitas intelektual dari orang Iliran dengan memandang mereka dengan kacamata kudanya sebagai orang tradisional yang terbelakang dan ketinggalan, cenderung tertutup, minderan, dan miskin. Orang Uluan selalu didudukkan pada posisi inferior sebagai orang udik, yang tidak tahu perkembangan, terutama perkembangan zaman yang berhubungan dengan kemajuan (Irwanto, 2010:02).

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa orang Iliran dan orang Uluan memiliki perbedaan dimana orang-orang di daerah Iliran lebih menganggap dirinya beradab, terbuka, berkuasa serta lebih modern. Sedangkan orang-orang di daerah Uluan lebih cenderung disebutorang pedalaman karena mereka dipandang ketinggalan, cenderung tertutup serta sulit mengalami kemajuan.

"Daerah yang sering kali menerima kemajuan yaitu daerah Iliran, sebab yang paling pertama menerima perubahan datang dari daerah Iliran sungai, yang kemudian kalau itu memang sampai, baru kemajuan itu menyentuh kearah dan mengarah ke dunia daerah Uluan" (Irwanto, 2010:03).

Daerah Iliran adalah muara akhir dari aliran panjang sebuah mata air yang mengalir melewati sungai. Sedangkan daerah Uluan adalah sumber mata air yang

membentuk sungai tadi dan berpangkal dari daerah pegunungan. Oleh sebab itu, daerah Iliran selalu identik dengan sebuah pintugerbang kedatangan "orang asing" yang membawa perubahan, perubahan tersebut tentunya terlebih dahulu bersemayam di daerah Iliran ini, baru mempengaruhi lingkungan sekitarnya untuk masuk ke daerah Uluan.

Semua kemajuan, baik secara politis, dan ekonomis dengan demikian harus diposisikan pada areal Iliran ini. Akibatnya, orang Iliran adalah agen perubahan dari semua kemajuan di setiap aliran sungainya. "secara geografis dan ekologis Palembang, yang terletak di daerah Ilir Sungai Musi, induk dari semua aliran sungai yang dinamakan dengan istilah Batanghari Sembilan tersebut merupakan pintu gerbang utama orang yang masuk kealiran Batanghari Sembilan" (Irwanto, 2010:04).

"Pada tahun 1602 berdirilah serikat dagang Belanda yang beroperasi dalam perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Serikat dagang Belanda itu bernama *Verenigde Oostindische Compagnie* (VOC)" (Boedenani, 1974:72).

> Interaksi dengan VOC telah terjadi sejak *medio* (pertengahan) abad ke-17 berupa hubungan dagang dan politik dan mencapai puncaknya dalam sebuah persengketaan yang dikenal dengan Peristiwa Kuto Gawang. Peristiwa yang banyak menelan korban jiwa dan harta benda ini dipicu oleh terbunuhnya Ockerz, utusan VOC oleh orang-orang Palembang pada Agustus 1658. Perang yang membumihanguskan kota setahun kemudian menyebabkan pemerintahan sempat diungsikan ke sakatiga, Ogan Ilir. Setelah kembali ke Palembang, pemerintah yang semula menjadi vazal Kesultanan Mataram berubah, yakni Kesultanan Palembang (Rahman, 2011:5).

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwasannya bahwa Palembang dengan VOC telah menjalin hubungan sejak pertengahan abad ke-17 berupa hubungan dagang dan politik yang disebut peristiwa Kuto Gawang. Perang yang dilakukan

VOC bertujuan untuk membumihanguskan kota sehingga banyak menelan korban jiwa dan harta benda. Setelah adanya peristiwa tersebut pemerintahan sempat diungsikan ke Sakatiga (Ogan Ilir) . Setelah kembali ke Palembang, Kesultanan Mataram berubah nama menjadi Kesultanan Palembang

Van Royen mengatakan bahwa "Dalam Kesultanan Palembang didapati Pemerintahan uang telah terorganisir dengan baik, dengan telah terbentuk masyarakat-masyarakat teritorial yang kokoh dan kuat. Namun setelah datangnya penjajah, kekuasaan Kesultanan menjadi lemah dan kehilangan kewibawaan yang ditambah lagi dengan kekacauan dari kerajaan sendiri" (Nanang, 2000:14).

Berdasarkan uraian diatas, tergambar bahwa kesatuan-kesatuan masyarakat hukum yang bersifat teritorial di zaman Kesultanan telah ada dan Pemerintah Belanda tinggal melanjutkan usaha-usaha ini dengan rasional dan sistematis.

Raja-raja atau sultan-sultan Palembang memiliki hubungan darah dengan raja-raja Jawa, oleh karena itu sistem pemerintahan yang mereka anut adalah sistem pemerintahan yang terdapat dari mana mereka berasal. Raja juga sering mudik ke hulu-hulu sungai daerah sampai masuk jauh kepedalaman dengan "ritualisme" pergi pesiar, berburu dan menangkap ikan. Pada saat itu dilakukan perundingan dengan kepala marga untuk mencapai sebuah kata kesepakatan dalam mengadakan "persahabatan", yang diselimuti embel-embel, dimana daerah tersebut bebas memperdagangkan hasil bumi ke Palembang. Pada daerah-daerah Uluan ini, sebagai imbalannya mereka diwajibkan membayar pajak dan sewaktu-waktu diperlukan diminta pula untuk menyiapkan tenaga kerja.

Daerah-daerah tersebut dinamakan “kepungutan” yang meliputi wilayah Musi Ilir dan sekitarnya. Untuk menjamin kelancaran kepungutan-kepungutan pajak maka di setiap aliran sungai di tempatkan seorang ”*jenang”* yang mengkoordinir marga-marga dalam aliran sungai kadang kala sering terjadi perselisihan antara satu marga dengan yang lainnya, dipicuh persoalan batas-batas marga, dalam mengatasi perselisihan ini, maka tangan raja atau sultan seiring diminta untuk ikut menjadi penengah. Pada masa pemerintahan Ratu Sinuhun yang memerintah dari tahun 1630 sampai dengan 1642 Masehi, sebagai puncaknya kemudian dilembagakan suatu aturan yang dapat mengikat dan mendorong orientasi para kepala marga dalam suatu kesatuan dengan membuat aturan-aturan adat pertama di daerah Uluan. Tahun 1854, aturan-aturan adat tadi dijadikan buku yang disebut “*Kitab undang-undang Simbur Cahaya”*.

> Semenjak Sultan Mahmud Badarudin II dikalahkan dan ditawan Belanda pada tanggal 6 juli 1821 untuk diasingkan ke Ternate Pada bulan Maret 1822, kesultanan harus berada dibawah kendali Pemerintahan Belanda. Kemudian ketika tahun 1824, kesultanan Palembang dengan sultan terakhirnya Sultan Ahmad Najamuddin III dihapuskan, maka Pemerintah Kolonial Belanda mulai berusaha mengontrol dan mengendalikan pemerintahan marga di semua wilayah Sumatera Selatan sekarang ini.Belanda Menggantikan “*jenang”* dengan seorang kontroleur dengan mengeluarkan Staadblad NO. 109 tahun 1827.Namun pada tingkatan bawahnya, Belanda tetap membiarkan marga dikepalai oleh oleh kepala-kepalanya sendiri, para *depati* atau *pesirah*Residen Palembang di daerah Iliran, Palembang, Untuk mempertegas aturan-aturan dalam Undang-undang Simbur Cahaya, kemudian mengeluarkan *circulaire No. 326* tanggal 27 juli 1873. Dalam aturan ini ditetapkan nama-nama jabatan dalam marga dan tata cara pemilihan serta syarat-syaratnya. Nama jabatan “*pesirah”* sebagai kepala marga, di mana *pesirah*berdomisili sekaligus pemegang jabatan wakil pesirah jika berhalangan,sedangkan kepala dusun disebut “*kerio”* kemudian syarat-syarat jabatan pamong marga adalah laki-laki

> yang sudah berkelurga, pandai baca tulis minimal tulisan "*rencong"* atau huruf ulu (Irwanto,2010:16)

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwasannya semenjak Sultan Mahmud Badaruddin II dikalahkan dan ditawan Belanda untuk diasingkan ke Ternate, Kesultanan harus berada dibawah kendali Pemerintahan Belanda. Kemudian pada saat tahun 1824 setelah Kesultanan Palembang dihapuskan maka semua bentuk sistem pemerintahan diambil alih oleh pihak Kolonial Belanda mulai berusaha mengontrol dan mengendalikan pemerintahan marga disemua wilayah Sumatera Selatan. Mulai dari menetapkan atturan-aturan dari Undang-Undang Simbur Cahaya yang dikeluarkan.

"Didalam masa kekuasaan Sultan Mahmud Badaruddin II inilah secara konfrontatif terjadi peperangan dengan Belanda-Perancis tahun 1811 (Peristiwa Loji Sungai Aur), serbuan armada Inggris tahun 1812, perang Palembang 1819 babak I dan II serta perang Palembang 1821" (Jalaludin, 1991:40).

> Perlawanan rakyat Palembang sejak peristiwa Loji Sungai Aur tahun 1811, perlawanan terhadap Mutinghe tahun 1819 (istilah Palembang "Perang Menteng"),dan terakhir penyerbuan yang dipimpin Wolterbeek, semua dengan hasil kekalahan Belanda. Kerajaan Belanda dan pemerintahan kolonial di Batavia (Jakarta) tergentak untuk membuat suatu perencanaan yang lebih matang untuk menundukkan Palembang dengan persiapan pasukan yang jauh lebih kuat dan siasat bagaimana caranya memecah belah kerabat kesultanan (khususnya Husin Dhiauddin dengan Sultan Mahmud Badaruddin II) secara efektif. Setelah perang 1819 berakhir, Sultan Mahmud Badaruddin II, telah mengantisipasi bahwa serangan akan dilakukan Belanda lagi. Selama dua tahun ekonomi berjalan dengan baik dan makmur, persiapan perang dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi alur pelayaran utama dari Palembang diblokade angkatan laut Belanda. Perombakan pemimpin pasukan Palembang dilakukan untuk persiapan perang. Demikian juga Belanda telah memperalat beberapa orang untuk memusuhi Badaruddin II, antara lain saudaranya yaitu bekas

> sultan Dhiauddin yang di asingkan di Jawa dan keluarganya dibujuk memihak Belanda. Tanggal 8 Mei 1821 ekspedisi penyerbuan ke Palembvang dipimpin Mayjen. De Kock dilepas gubernur jenderal Van Der Capellen di Batavia dengan upacara kebesaran. Kekuatan pasukan penyerbuan ke Palembang ini jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Tanggal 11 Mei 1821 sampai 24 Juni 1821 sepanjang sungai Musi sampai Kertapati (Soetadji, 1995:13-14).

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa perlawanan rakyat Palembang sejak peristiwa Loji Sungai Aur tahun 1811 yang dipimpin Wolterbeek membuat Belanda kalah. Kemudian Kerajaan Belanda dan pemerintahan kolonial di Batavia (Jakarta) tergentak untuk membuat suatu perencanaan yang lebih matang untuk menundukkan Palembang dengan persiapan pasukan yang jauh lebih kuat dan siasat bagaimana caranya memecahbelah kerabat Kesultanan (Khususnya Husin Dhiauddin dengan Sultan Mahmud Badaruddin II) secara efektif.

Serah terima keraton dengan seluruh kekayaan Kesultanan Palembang Darussalam dilaksanakan oleh putra Badaruddin II, yaitu Pangeran Prabukesuma dan menantunya Pangeran Kramajaya kepada kolonel Bischoff pada tanggal 1 Juli 1821. Menjelang tengah malam 3 Juli 1821 Badaruddin II disertai putra sulungnya dan seluruh keluarga lainnya menaiki kapal Dageraad. Kesultanan Palembang dijadikan bagian dari Kresidenan Palembang di bawah pemerintahan kolonial Belanda sesuai perjanjian yang diadakan pada tanggal 18 Mei 1823. Selanjutnya Sultan Najamuddin IV mendapat gaji dari Pemerintah Kolonial. “Meskipun secara formal kekuasaan sultan sudah tidak ada, dalam kenyataannya Belanda tidak bisa menguasai masyarakat Palembang, terutama di daerah pedalaman. Untuk itu Belanda mengangkat keluarga (menantu) mantan Sultan Badaruddin II, Pangeran Kromo Jayo

(Kramajaya) sebagai pejabat Negara, karena kerabat Badaruddin II inilah yang mempunyai kharisma didepan rakyat dan rakyat masih mengharapkan kembalinya Kesultanan Palembang" (Soetadji, 1995:15).

"Sejak dihapuskannya sistem Kesultanan Palembang pada 1825 atau ketika pemerintahan kolonial Belanda mengambil alih kekuasaan daerah itu, maka bekas wilayah Kesultanan Palembang dijadikan dua Karesidenan, yaitu Karesidenan Palembang dan Bangka Belitung" (Supriyanto, 2013:42).

Setelah itu, di Palembang dan sekitarnya diperkenalkan suatu bentuk pemerintahan sementara (*Dadelijke Regeering*) yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana pada setiap daerah yang sudah dikuasai Belanda dipegang langsung oleh komandan pasukan Belanda di daerah pendudukan setempat. Maka berusaha bekerja sama dengan penguasa pribumi setempat. Pada tahun 1852, Palembang dibagi menjadi daerah-daerah administrative yang lebih kecil sebagai konsekwensi dihapusnya sistem pemerintahan Kesultanan. Daerah-daerah administrative tersebut, yang selanjutnya disebut *Afdeeling*, yaitu Ibukota Palembang, Tebing Tinggi, Ogan Komering Ulu, Rawas dan Jambi. Periode selanjutnya, tahun 1875-1907, merupakan prakondisi yang diperlukan bagi kepentingan politik dan ekonomi Kolonial di daerah Palembang dan sekitarnya. Bentuk-bentuk pemerintahan tradisional mulai disisihkan dan digantikan dengan sistem baru.

> Masa berakhirnya Kesultanan Palembang tidak terpisahkan dari keberhasilan Belanda dalam memaksa Sultan Badaruddin II untuk menghentikan perlawanannya. Dengan kekuatan militer yang sangat besar di bawah pimpinan Jenderal Mayor Hendrik Markus Baron De Kock. Belanda mencoba membalas kekalahannya dan berusaha

> mengakhiri perlawanan Sultan Mahmud Badaruddin II. Pengerahan kekuatan militer secara besar-besaran tidak menjamin penaklukan Palembang berlangsung dengan mudah karena pihak Kesultanan Palembang juga telah mempersiapkan diri dengan memperkuat benteng pertahanan, persenjataan, maupun komando dan personelnya (Hanafiah, 1986:127-129).

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa Masa berakhirnya Kesultanan Palembang tidak terpisahkan dari keberhasilan Belanda dalam memaksa Sultan Badaruddin II untuk menghentikan perlawanan. Dengan kekuatan militer yang sangat besar Belanda mencoba membalas kekalahannya dan berusaha mengakhiri perlawanan Sultan Mahmud Badaruddin II. Namun Palembang mengerahkan kekuatan militer secara besar-besaran dan juga telah mempersiapkan diri dengan benteng pertahanan, persenjataan, maupun komando dan personelnya.

Setelah runtuhnya Kesultanan Palembang rakyat pedalaman masih mengharapkan kembalinya Kesultanan Palembang dan dengan lemahnya pemerintahan timbullah pergolakan-pergolakan bahkan kolonial di pedalaman, pemberontakan terutama di daerah Pasemah. Adanya peristiwa-peristiwa yang memusingkan pemerintah kolonial ini, Belanda tidak dapat mempercayai Pangeran Kramo Joyo dan Belanda menududhnya terlibat. Kemudian ia dipecat dan dibuang ke Jawa pada tahun 1851. Dengan demikian habislah sisa-sisa peranan kekuasaan Kesultanan Palembang dan berganti dengan kekuasaan kolonial Belanda secara mantap.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa berakhirnya Kesultanan Palembang berawal dari penyerahan kekuasaan Kesultanan dari tangan kekuasaan Pangeran Prabukesuma yang merupakan putra dari Sultan Mahmud Badaruddin II

dan menantunya Pangeran Kramajaya kepada Kolonel Bischoff pada tanggal 1 Juli 1821. Berawal dari Kesultanan Palembang di kuasai oleh Pemerintah Kolonial Belanda.

Penelitian tentang Kesultanan Palembang sudah pernah diteliti oleh Holis Triyani, Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang(2008) dengan Judul : *Perlawanan Rakyat Jati Lahat Terhadap Belanda Setelah Runtuhnya Kesultanan Palembang Tahun 1821* dengan kesimpulan proses terjadinya perang di Desa Jati Lahat yang berkecamuk selama 13 tahun yang terjadi di Lematang Dusun Jati pada periode 1856-1869 adalah setelah Belanda sampai ke daerah Lahat Belanda ingin menguasai daerah Basemah. Pertempuran yang terjadi di dalam Benteng Jati dan dengan adanya filsafah hidup suku Gumay Seganti Setungguan dan Sekehepat Sekehendi, kemudian pada tahun (1859) Mimbar Mas dan Belanda mengadakan perundingan dan memberikan perintah kepada Belanda agar meninggalkan daerah jajahannya di Lahat. Dan dampak dari perang ini yaitu banyaknya korban dari pasukan Belanda yang tewas dalam melakukan perlawanan dengan Suku Gumay.

Peneliti selanjutnya yaitu diteliti oleh Jeky Supriyadi, Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang (2014)dengan Judul: *Jejak Kesultanan Palembang Darussalam di kabupaten Banyuasin pada tahun 1825*. Berdasarkan hasil penelitian Jeky Supriyadi dapat disimpulkan bahwa Sistem marga sudah sejak lama berkembang saat kerajaan Sriwijaya atau sebelum kesultanan Palembang Darussalam ada. Selain itu daerah Uluan tidak ditundukkan dengan

kekerasan karena raja Palembang tidak mempunyai tentara yang teratur saat itu. Bayuasin sebagai wilayah kekuasaan kesultanan Palembang Darussalam termasuk kategori daerah sikep. Sama dengan sistem pemerintahan marga daerah di daerah Uluan, wilayah Banyuasin zaman marga kesultanan Palembang Darussalam tidak mempunyai pemerintahan sendiri, tetapi diperintah langsung oleh pejabat pemerintah pusat yang diberi hak penguasaan atas dusun atau marga dusun.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian tentang *"Perbandingan Sistem Pemerintahan di Iliran dan Uluan Paska Runtuhnya Kesultanan Palembang Pada Tahun 1825-1942".*

Dari hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu terdapat perbedaan dan persamaan terhadap judul yang penulis teliti. Dimana *perbedaannya* yang penulis teliti terletak pada Perbandingan Sistem Pemerintahan yang menjadi objek penelitian. Sedangkan *perbedaannya* dengan peneliti pertama yaitu jika yang dilakukan peneliti pertama tahun 2008 yaitu Perlawanan Rakyat yang menjadi objek penelitian. Kemudian, *perbedaannya* dengan peneliti terdahulu yang dilakukan pada tahun 2014 yaitu Jejak Kesultanan Palembang Darussalam. Perbedaan lainnya juga terletak pada lokasi penelitian, perbedaan dari peneliti terdahulu yang dilakukan oleh peneliti yang dilakukan pada tahun 2008 dengan perbedaan yang peneliti teliti tahun 2018-2019 yaitu jika peneliti pertama lokasi yang diangkat adalah di Desa Lahat sedangkan lokasi yang peneliti teliti yaitu di Palembang Iliran dan Uluan. Sedangkan perbedaannya dengan peneliti kedua yaitu yang dilakukan pada tahun 2014 yaitu berlokasi di Banyuasin. Perbedaan lainnya juga terletak pada (periode) penelitian

pertama dilakukan tahun 2008 yang membatasi waktu kajian (periode) 1821. Penelitian kedua dilakukan pada tahun 2014 yang membatasi waktu kajian (periode) 1825, sedangkan penelitian yang penulis teliti dari tahun 2018-2019 yang membatasi waktu kajian (periode) 1825-1942.

Selanjutnya penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti juga memiliki persamaan. *Persamaan* peneliti pertama yang dilakukan tahun 2008 memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang Pasca Runtuhnya Kesultanan Palembang. Kemudian, *persamaanya* juga membahas tentang Kesultanan Palembang.

B. Pembatasan Masalah

Untuk memperoleh suatu analisis yang tajam dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian berdasarkan dua aspek, yaitu aspek *spatial* atau dimensi ruang atau dimensi tempat dan aspek *temporal* atau dimensi waktu.

1. *Scope Spatial* membatasi wilayah penelitian yaitu di Daerah Palembang Ilir dan Palembang Ulu, khususnya di daerah Seberang Ulu (pada waktu itu yang terdiri dari 16 kampung) dan Seberang Ilir (pada waktu itu yang terdiri dari 36 kampung). Alasannya penulis membatasi wilayah pada daerah Palembang Ilir dan Palembang Ulu ini karena daerah Palembang ini merupakan wilayah pedalaman yang mendapatkan pengaruh dari akibat dihapuskannya Kesultanan Palembang.
2. *Scope Temporal* penulis membatasi waktu penelitian yaitu pada tahun 1825-1942. Karena pada tahun 1824 terjadinya serangan yang dilakukan antara

pihak Belanda dengan Palembang yang pada saat itu Palembang dipimpin oleh Sultan Mahmud Badaruddin II yang dimana Belanda ingin merebut Daerah Kekuasaan Palembang hingga akhirnya Palembang berhasil di rebut oleh Belanda sehingga pada tahun 1824 juga di Hapuskannya Kesultanan Palembang kemudian penulis mengambil tahun 1825 karena pada tahun 1825 merupakan awal dari Pasca runtuhnya Kesultanan Palembang dan pada tahun ini juga awal dibentuknya Keresidenan Palembang yang masih berada dibawah kekuasaan Belanda. Dan penulis membatasi pada tahun 1942 dimana sistem Keresidenan di Palembang dihapuskan.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan ruang lingkup penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pemerintahan di Iliran pasca runtuhnya Kesultanan Palembang pada tahun 1825-1942?
2. Bagaimanas sistem pemerintahan di Uluan pasca runtuhnya Kesultanan Palembang pada tahun 1825-1942?
3. Bagaimana dampak dari sistem pemerintahan di Iliran dan Uluan pasca runtuhnya Kesultanan Palembang pada tahun 1825-1942?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk :

1. Mengetahui sistem pemerintahan di Iliran pasca runtuhnya Kesultanan

Palembang pada tahun 1825-1942

2. Mengetahui sistem pemerintahan di Uluan pasca runtuhnya Kesultanan Palembang pada tahun 1825-1942
2. Mengetahui dampak dari sistem pemerintahan di Iliran dan Uluan pasca runtuhnya Kesultanan Palembang pada tahun 1825-1942

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pembaca

Semoga hasil penelitian ini menambah pengetahuan, pengalaman serta dapat memperkaya wawasan perihal Kesultanan Palembang terutama sistim pemerintahan di Iliran dan Uluan pasca runtuhnya Kesultanan Palembang.

2. Bagi Mahasiswa

Dapat menambah ilmu pengetahuan, khususnya sejarah lokal dalam menggali sejarah masa lampau, sehingga dapat memberikan sumbangsi terhadap khasanah sejarah nasional dan menambah pengetahuan baru dalam pembelajaran.

3. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman tentang fakta-fakta sejarah secara faktual.

4. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan pelajaran mengenai sistem pemerintahan pasca runtuhnya Kesultanan Palembang.

F. Daftar Istilah

Sesuai dengan judul penelitian yaitu, *Perbandingan Sistem Pemerintahan di Iliran dan Uluan Pasca Runtuhnya Kesultanan Palembang pada tahun 1825-1942* ditemukan berbagai definisi istilah yang digunakan untuk menerangkan berbagai istilah-istilah yang tidak dimengerti. Oleh karena itu penulisan ini disertai daftar istilah, sesuai dengan isi *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru Depdikbud 2009*, sebagai berikut :

Adat : Tradisi dan kebudayaan lokal

Benteng : Sesuatu yang dijadikan sebagai pertahanan kedudukan

Depati : Raja-raja kecil di pedalaman atau kepala-kepala rakyat yang bebas

Dusun : Kampung kecil bagian dari wilayah desa

Heuristik : Pengumpulan sumber sejarah

Historiografi : Penulisan sejarah

Ilir : Bagian hilir sungai atau daerah dataran rendah

Interprestasi : Pemberian kesan, pendapat atau pandangan teoritis terhadap jenisbadan, sifat atau keadaan badan, perawakan orang yang kawan yang ikut bersetikat, bangsa negara yang berkawan kecintaan

Jenang : Pejabat pemerintahan pusat yang diberi hak penguasaan atas dusun atau marga dusun

Kesultanan : Daerah kekuasaan Raja atau Baginda

Kolonial : Perihal sipat-sipat jajahan

Kota : Daerah permukiman yang terdiri atas bangunan rumah yang merupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat.

Miji : Sekelompok orang yang diserahi tanggung jawab melakukan berbagai pekerjaan tangan untuk sultan dan para priyayi

Palembang : Ibu Kota Sumatera Selatan yang merupakan kota tertua di Palembang

Paseban : Balai tempat menghadap sultan/raja

Pasirah : Kepala marga, sering pula disebut Depati Pencalang Perahu kecil terbuat dari papan

Pengalasan : Prajurit atau hulu balang sultan

Priyayi : Orang-orang yang mempunyai pertalian darah dengan sultan

Raden : Gelar bangsawan Palembang

Rakyat : Segenap penduduk suatu Negara (sebagai imbangan Pemerintah).

Simbur Cahaya : Undang-Undang Kesultanan Palembang yang disusun oleh Ratu Sinuhun, yang dikompilasi dan dikodifikasi pada masa Kolonial Belanda

Sindang : Daerah otonom zaman kesultanan Palembang

Sistem : Sekelompok bagian-bagian alat dsb yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu maksud, sekelompok dari pendapat peristiwa, kepercayaan dan sebagainya yang disusun dandiatur baik-baik, cara, metode yang teratur untuk melakukan sesuatu

Uluan : Struktur Pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam yang dibagi atas pemerintahan yang ada di ibukota yang sepenuhnya di Kuasai Sultan dan di Daerah pedalaman

VOC : (Vereenigde Oostindische Compagni) persekutuan dagang milik Hindia Belanda pada abad XVII yang memiliki kekuasaan besar

DAFTAR RUJUKAN

Abdullah, Ma,Moen.1992. *Sejarah Daerah Sumatera Selatan.* Sematerah Selatan: Dapatermen Pendidikan dan Kebudayaan.

Abdurahman, Dudung. 2011. *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak.

Abdurahman, Dudung. 2007. *Metodologi Sejarah*. Jakarta: Logos

Arif, Muhammad. 2011. *Pengantar Kajian Sejarah.* Bandung: Yrama Widiya

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik.* Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Badaruddin. 2008. *Kota Palembang Dari Wabua Sriwijaya menuju Palembang Modern Palembang.* Yogyakarta: Ombak.

Basri. 2006. *Metodologi Penelitian Sejarah (Pendekatan Teori Dan Praktek)*. Jakarta: Ratu Agung

Boedenani. 1974. *Sejarah Sriwijaya*. Bandung: Tarate

Daryanto. 1997. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: Apollo

Depdikbud. 2009. *Kamus Umum Bahasa Indonesia.*Jakarta: Balai Pustaka.

De Roo de Faille, F. 1971. *Dari Zaman Kesultanan Palembang.* Djakarta: Bhratara

Hamalik, Oemar. 2003. *Pendekatan Baru Strategi Belajar Mengajar Berdasarkan CBSA.* Bandung: Sinar Baru Algesindo

Hanafiah, Djohan. 1988. *Kuto Besak: Upaya Kesultanan Palembang Menegakkan Kemerdekaan.* Jakarta: CV Haji Masagung

Hanafiah, Djohan dkk. 2008. *Kota Palembang dari Wanua Sriwijaya Menuju Palembang Modern*. Katalog Dalam Terbitan KDT. Pemerintah Kota Palembang.

Jalaludin. 1991. *Petunjuk Kota Palembang (Dari Wanua ke Kotamadya)*. Palembang: Humas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang.

Kartodirdjo, Sartono. 1993. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodelogi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Irwanto Dedi .2010. *Iliran dan Uluan Dikotomi dan Dinamika Dalam Sejarah Kultural Palembang*. Yogyakarta: Eja Publisher.

Irwanto, Dedi dan Alian Syair. 2014. *Metodologi dan Historiografi Sejarah: Cara Cepat Menulis Sejarah.*Yogyakarta : Eja-Publisher

Ismaun. 2001. *Filsafat Ilmu 1*. Bandung : UPI Bandung

Jumhari. 2010. *Sejarah Sosial Orang Melayu Keturunan Arab dan Cina di Palembang*. Padang Sumatera Barat: BPSNT Padang Press.

Kartodirdjo. 1993. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia

Lempok. 1969. *Kota Palembang*. Palembang: Jajasan Dana Basis Palembang.

Langgulung, Hasan. 1986. *Manusia dan Pendidikan; Suatu Analisis Psikologi dan Pendidikan*.Jakarta : Pustaka Al-Husna

Mahmud, Ki Agus Imran. 2008. *Sejarah Palembang*. Palembang: Anggrek

Nawiyanto, Endrayadi Eko Crys.2016. *Kesultanan Palembang Darussalam Sejarah dan Warisan Budayanya.*Palembang :Tarutama Nusantara

Notosusanto. 1986. *Mengerti Sejarah : Pengantar Moetode Sejarah terjemahan penulis Louis Gottssctalk*. Jakarta : Universitas Indonesia

Phoenik, Pustaka. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru.* Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix

Poesponegoro, Marwati Djoned. 1993. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Balai Pustaka. Jakarta.

Ratna, Nyoman Kutha. 2010. *Metodologi Penelitian Kajian Budaya Dan Ilmu-Ilmu Sosial Numaniora Pada Umumnya.*Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Rahim, Husni. 1998. *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial Palembang.* Jakarta: Logos

Rahman, Saipul dkk. 2011. *Sejarah Kota Palembang Nama Kampung, Pasar, dan Nama Jalan*. Palembang: CV Karima Sukses Mandiri.

Rivai, Liza. 2001. *Sejarah Pendidikan Di Kota Palembang.* Yogyakarta: Philosophy Press.

Santun, Muhammad Dedi Irwanto Muhammad,dkk. 2010.*Iliran dan Uluan : Dinamika danDikotomi Sejarah Kultural Palembang.*Yogyakarta : A Publisher.

S. Soetadjie, Nanang. 1995. *Kesultanan Palembang*. Palembang

Sudjana, Nana dan Ibrahim. 2004. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung : Sinar Baru Algensindo

Sumaatmadja. 1997. *Pengajaran Geografi*. Jakarta: Gramedia Pustaka

Supriyanto. 2013. *Pelayaran dan Perdagangan di Pelabuhan Palembang 1824-1864.* Yogyakarta: Ombak

Syamsudin, Helius. 2007. *Metodologi Sejarah*. Jakarta : Ombak

Tahyudin, Didi. 1997. *Lintas Sejarah Budaya Sumatera Selatan*. Palembang: Universitas Sriwijaya.

Triyono. 2016. *Kesultanan Palembang Darussalam*. Http:www.infokito.com diakses 3 September 2016.

Sevenhoven, Van,J.L. 1971. *Lukisan Tentang Ibukota Palembang*. Jakarta: Bhratara.

Zulkipli, Abdul Karim Nasution. 2001. *Islam Dalam Sejarah dan Budaya Masyarakat Sumatera Selatan*. Palembang: Universitas Sriwijaya.